

Sustainable Financing for Blue Food: Financing Mechanisms, Risks, and Barriers for Fisheries MSMEs

Pembiayaan Berkelanjutan untuk Blue Food; Mekanisme Pembiayaan, Resiko, dan Hambatan untuk UMKM Perikanan

Siti Yasya Ey Fathanah¹, Nudia Tuljannah², Risqah Amaliah Kasman³, Haerawati⁴, Riskayanti⁵, A. Rahmatia⁶, Ian Muhammad Bintang P⁷, Indri Saputri⁸

¹⁻⁸Institut Teknologi dan Kesehatan Permata Ilmu Maros, Maros, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Siti Yasya Ey Fathanah

✉ Sitiyasya06@itkpi.ac.id

History:

Submitted: 10-06-2025

Revised: 23-06-2025

Accepted: 27-06-2025

Published: 30-06-2025

Keywords:

Sustainable Finance; Blue Food; Fisheries Msmes; Financing Risk; Financial Inclusion.

Kata Kunci:

Pembiayaan Berkelanjutan; Blue Food; UMKM; Risiko Pembiayaan; Inklusi keuangan.

Abstract

The blue food sector plays a strategic role in strengthening food security and improving the livelihoods of coastal communities. However, fisheries micro, small, and medium enterprises (MSMEs) continue to face limited access to finance and high business risks. This study aims to analyze sustainable financing mechanisms, risk profiles, and financing barriers among fisheries MSMEs affiliated with KUB Binaga Sangkara II in Maros Regency, South Sulawesi, Indonesia. A mixed-methods approach with a descriptive-analytical design was employed. Primary data were collected through structured questionnaires, in-depth interviews, and field observations, while secondary data were obtained from organizational documents and relevant literature. Quantitative data were analyzed using descriptive statistics and a risk matrix framework, whereas qualitative data were examined through thematic analysis. The findings indicate that financing access remains dominated by conventional schemes, particularly government-supported microcredit and cooperatives, with limited integration of environmental and social sustainability principles. Production risks due to weather variability and market risks from price fluctuations were identified as the most significant factors affecting business stability and repayment capacity. Major barriers to financing include lack of collateral, complex administrative procedures, and low financial literacy. This study recommends the development of adaptive seasonal-based financing schemes, integration of risk mitigation mechanisms such as fisheries insurance, and financial literacy enhancement programs to strengthen sustainable finance implementation in the blue food sector.

Abstrak

Sektor *blue food* memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat pesisir, namun UMKM perikanan masih menghadapi keterbatasan akses pembiayaan serta tingginya risiko usaha. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pembiayaan berkelanjutan, risiko, dan hambatan akses pembiayaan pada UMKM perikanan yang tergabung dalam KUB Binaga Sangkara II di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Penelitian menggunakan pendekatan *mixed methods* dengan desain deskriptif-analitis. Data primer diperoleh melalui kuesioner, wawancara mendalam, dan observasi, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen kelompok dan literatur terkait. Analisis kuantitatif dilakukan menggunakan statistik deskriptif dan matriks risiko, sedangkan analisis kualitatif menggunakan pendekatan tematik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pembiayaan yang diakses masih didominasi oleh skema konvensional seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan koperasi, dengan integrasi prinsip keberlanjutan yang masih terbatas. Risiko produksi akibat faktor cuaca dan risiko pasar akibat fluktuasi harga merupakan risiko utama yang memengaruhi stabilitas usaha. Hambatan utama dalam akses pembiayaan meliputi keterbatasan agunan, kompleksitas administrasi, dan rendahnya literasi keuangan. Penelitian ini merekomendasikan pengembangan skema pembiayaan adaptif berbasis musim, integrasi mekanisme mitigasi risiko, serta peningkatan literasi keuangan sebagai strategi penguatan pembiayaan berkelanjutan pada sektor *blue food*.

PENDAHULUAN

Wilayah laut sejak dahulu memiliki peranan besar dalam menunjang kehidupan manusia, tidak hanya sebagai penyedia sumber makanan, tetapi juga sebagai sarana transportasi serta potensi penghasil energi. Dengan luasnya yang mencapai lebih dari 70% permukaan bumi, lautan memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (Adibrata dkk, 2022). Akan tetapi, pemanfaatan yang melampaui batas serta pengelolaan yang kurang bijaksana telah memicu berbagai persoalan lingkungan, antara lain kerusakan ekosistem laut, meningkatnya pencemaran, dan menurunnya jumlah populasi ikan (Rahman dkk, 2024). Konsep *blue economy* menekankan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir, serta pelestarian ekosistem laut. Salah satu subsektor strategis dalam kerangka *blue economy* adalah *blue food*, yang mencakup produksi, distribusi, dan konsumsi pangan berbasis sumber daya perairan seperti perikanan tangkap, budidaya, dan hasil olahan laut (Riesnandar dkk, 2025).

Gagasan Blue Economy pertama kali dipopulerkan oleh Gunter Pauli melalui bukunya *The Blue Economy: 10 Years, 100 Innovations, 100 Million Jobs* yang terbit pada tahun 2010. Konsep ini menekankan bahwa pemanfaatan sumber daya kelautan seharusnya mampu menciptakan manfaat ekonomi yang bersifat inklusif tanpa mengorbankan keberlanjutan ekosistem laut (Humairoh dkk, 2024). Perkembangannya semakin pesat seiring meningkatnya kesadaran global terhadap pentingnya pembangunan yang berwawasan lingkungan, khususnya dalam merespons isu perubahan iklim dan kerusakan ekosistem pesisir dan laut. Di sejumlah negara, pendekatan Blue Economy kemudian diadopsi sebagai strategi utama dalam tata kelola sumber daya kelautan, antara lain melalui penerapan perikanan berkelanjutan, pengembangan ekowisata bahari, pemanfaatan energi terbarukan berbasis laut, serta inovasi di bidang bioteknologi kelautan (Papur dkk, 2024).

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan potensi sumber daya perikanan yang besar memiliki peluang strategis dalam pengembangan *blue food*. Implementasi ekonomi biru pada dasarnya berkaitan dengan keberlangsungan hidup masyarakat yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan atau petani ikan. Selain itu konsep ekonomi biru menitikberatkan pada pemanfaatan semua sumber daya yang ramah lingkungan, tidak merusak lingkungan, dan meminimalisir timbunan sampah. Hal tersebut akan tercipta dengan sangat baik apabila memiliki kesadaran diri untuk saling menjaga antara usaha dan lingkungan (Prayuda dkk, 2019). Faktor utama keberhasilan pelaksanaan ekonomi biru adalah pengelolaan usaha perikanan yang tepat (Bhattacharya & Dash, 2020). Berdasarkan kebijakan nasional yang sejalan dengan agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), sektor kelautan dan perikanan diarahkan untuk dikelola secara produktif dan berkelanjutan. Namun demikian, optimalisasi potensi tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, terutama pada skala usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) perikanan.

UMKM perikanan memiliki peran penting dalam rantai nilai *blue food*, tetapi umumnya menghadapi keterbatasan akses terhadap sumber pembiayaan. Hambatan yang sering muncul meliputi keterbatasan agunan, rendahnya literasi keuangan, fluktuasi produksi akibat faktor cuaca dan musim, serta risiko pasar yang tinggi. Kondisi tersebut menyebabkan lembaga keuangan cenderung memandang sektor perikanan sebagai sektor berisiko tinggi (*high risk sector*), sehingga akses pembiayaan menjadi terbatas. Keadaan sosial ekonomi masyarakat pembudi daya ikan bisa dikatakan hampir sama nasibnya

dengan nelayan di wilayah pesisir pantai di Indonesia. Kehidupan nelayan dan pembudi daya ikan umumnya masih berada dalam pola-pola kemiskinan dan ketidakpastian ekonomi, karena kesulitan hidup yang dihadapi nelayan dan pembudidaya juga keluarganya (Helmi & Arif, 2012).

Dalam konteks tersebut, konsep *sustainable finance* atau pembiayaan berkelanjutan menjadi relevan. Pembiayaan berkelanjutan tidak hanya mempertimbangkan aspek kelayakan ekonomi, tetapi juga mengintegrasikan dimensi lingkungan dan sosial dalam proses penyaluran dana. Skema ini berpotensi mendukung transformasi UMKM perikanan menuju praktik usaha yang lebih tangguh, inklusif, dan ramah lingkungan. Namun, implementasi mekanisme pembiayaan berkelanjutan pada sektor *blue food*, khususnya pada kelompok usaha perikanan skala kecil, masih memerlukan kajian empiris yang mendalam.

Kelompok Usaha Bersama (KUB) KUB Binaga Sangkara II di Desa Ampekale, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, merupakan salah satu kelompok perikanan pesisir yang menjalankan aktivitas usaha berbasis sumber daya laut. Kelompok ini memiliki karakteristik usaha yang rentan terhadap risiko produksi dan pasar, serta menghadapi dinamika akses pembiayaan dari berbagai sumber formal maupun nonformal. Kondisi tersebut menjadikan kelompok ini sebagai lokasi yang relevan untuk menganalisis mekanisme pembiayaan berkelanjutan, risiko, serta hambatan yang dihadapi UMKM perikanan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan *mixed methods* dengan desain deskriptif-analitis. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengidentifikasi pola mekanisme pembiayaan, tingkat risiko, dan hambatan yang dihadapi UMKM perikanan, sedangkan pendekatan kualitatif digunakan untuk memperdalam pemahaman mengenai dinamika implementasi pembiayaan berkelanjutan pada sektor *blue food*. Integrasi kedua pendekatan dilakukan pada tahap interpretasi hasil untuk memperoleh analisis yang komprehensif. Penelitian ini dilaksanakan pada Kelompok Usaha Bersama (KUB) Binaga Sangkara II yang berlokasi di Dusun Binaga Sangkara, Desa Ampekale, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Indonesia. Wilayah ini merupakan kawasan pesisir yang memiliki karakteristik usaha perikanan tangkap dan aktivitas ekonomi berbasis sumber daya kelautan (*blue food*). Pemilihan lokasi dilakukan secara purposive dengan pertimbangan bahwa KUB Binaga Sangkara II merupakan kelompok perikanan aktif yang menjalankan usaha produktif secara berkelanjutan serta memiliki pengalaman dalam mengakses skema pembiayaan formal maupun nonformal. Selain itu, Desa Ampekale termasuk wilayah dengan potensi perikanan yang signifikan di Kabupaten Maros sehingga relevan dengan fokus penelitian mengenai mekanisme pembiayaan berkelanjutan, risiko, dan hambatan bagi UMKM perikanan. Penelitian dilaksanakan selama ± 6 bulan yang meliputi tahap persiapan instrumen penelitian, pengumpulan data lapangan, pengolahan dan analisis data, serta penyusunan artikel ilmiah. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota KUB Binaga Sangkara II yang menjalankan usaha perikanan. Teknik pengambilan sampel kuantitatif menggunakan metode sensus (apabila jumlah anggota terbatas) atau *proportional sampling* sesuai jumlah anggota aktif. Untuk pengumpulan data kualitatif, informan kunci dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, meliputi ketua kelompok, bendahara, anggota aktif, serta perwakilan lembaga pembiayaan atau instansi terkait yang berhubungan dengan akses pembiayaan kelompok.

Data kuantitatif dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada responden. Data kualitatif diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengidentifikasi kondisi riil usaha perikanan dan praktik pengelolaan pembiayaan. Instrumen penelitian diuji validitasnya menggunakan korelasi *Pearson Product Moment* dan reliabilitasnya menggunakan koefisien *Cronbach's Alpha*. Data kuantitatif dianalisis menggunakan statistik deskriptif untuk menggambarkan karakteristik responden, jenis pembiayaan yang diakses, tingkat risiko, serta hambatan pembiayaan. Analisis yang digunakan meliputi persentase, rata-rata (*mean*), dan distribusi frekuensi. Untuk mengidentifikasi tingkat risiko pembiayaan, digunakan analisis matriks risiko berdasarkan dua dimensi, yaitu tingkat kemungkinan (*likelihood*) dan tingkat dampak (*impact*). Hasil klasifikasi risiko dikelompokkan ke dalam kategori rendah, sedang, dan tinggi. Data kualitatif yang diperoleh melalui wawancara dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif-tematik melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman mengenai mekanisme pembiayaan berkelanjutan dan hambatan yang dihadapi UMKM perikanan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Berdasarkan hasil survei terhadap anggota KUB Binaga Sangkara II, mayoritas responden merupakan pelaku usaha perikanan tangkap skala kecil dengan pengalaman usaha 5–15 tahun. Sebagian besar responden memiliki tingkat pendidikan menengah dan bergantung pada pendapatan harian dari hasil tangkapan laut. Sebanyak 68% responden menyatakan pernah mengakses pembiayaan, baik melalui lembaga formal (bank/KUR) maupun nonformal (koperasi dan pinjaman antar anggota). Namun, 32% lainnya belum pernah mengakses pembiayaan formal karena keterbatasan agunan dan prosedur administratif.

Mekanisme Pembiayaan Berkelanjutan

Hasil analisis menunjukkan bahwa mekanisme pembiayaan yang paling banyak digunakan adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan koperasi nelayan. Skema pembayaran umumnya bersifat angsuran bulanan dengan tenor 12–24 bulan. Namun, integrasi aspek keberlanjutan (lingkungan dan sosial) dalam proses pembiayaan masih relatif rendah. Hanya 27% responden yang menyatakan bahwa terdapat persyaratan terkait praktik ramah lingkungan dalam proses pengajuan pembiayaan.

Tabel 1. Distribusi Jenis Pembiayaan yang Diakses Responden

Jenis Pembiayaan	Persentase (%)
Kredit Usaha Rakyat (KUR)	40%
Koperasi Nelayan	28%
Pinjaman Nonformal	20%
Fintech Lending	12%

Data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa mayoritas responden mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai sumber pembiayaan utama. Hal ini mengindikasikan bahwa skema pembiayaan bersubsidi pemerintah relatif lebih mudah dijangkau dibandingkan skema komersial. Program KUR memang dirancang untuk meningkatkan akses pembiayaan UMKM yang feasible namun belum bankable (Tambunan, 2019). Namun demikian, rendahnya persentase penggunaan fintech lending (12%) menunjukkan bahwa digitalisasi pembiayaan pada sektor perikanan masih terbatas. Padahal, pembiayaan berbasis teknologi finansial berpotensi memperluas inklusi keuangan di wilayah pesisir (Demirgüç-Kunt dkk, 2018).

Selain itu, masih tingginya pinjaman nonformal (20%) menunjukkan adanya keterbatasan akses terhadap lembaga formal, yang umumnya disebabkan oleh persyaratan agunan dan prosedur administratif. Kondisi ini sejalan dengan temuan Cull dkk, (2014) yang menyatakan bahwa UMKM di sektor primer cenderung menghadapi kendala struktural dalam mengakses kredit formal.

Dari perspektif pembiayaan berkelanjutan, hasil ini menunjukkan bahwa mekanisme yang ada masih berorientasi pada pembiayaan konvensional dan belum sepenuhnya mengintegrasikan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam evaluasi pembiayaan (OECD, 2020).

Analisis Resiko Pembiayaan

Berdasarkan hasil analisis matriks resiko produksi akibat faktor cuaca dan musim merupakan resiko tertinggi yang memengaruhi kemampuan pembayaran pinjaman. Resiko pasar berupa fluktuasi harga ikan juga berkontribusi signifikan terhadap ketidakstabilan pendapatan.

Tabel 2. Matriks Risiko Pembiayaan UMKM Perikanan

Jenis Risiko	Tingkat Kemungkinan	Dampak	Kategori Risiko
Risiko Produksi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
Risiko Pasar	Tinggi	Sedang	Tinggi
Risiko Operasional	Sedang	Sedang	Sedang
Risiko Gagal Bayar	Rendah	Tinggi	Sedang

Tabel 2 menunjukkan bahwa risiko produksi dan risiko pasar berada pada kategori tinggi. Risiko produksi terutama disebabkan oleh faktor cuaca, musim tangkap, dan perubahan iklim. Sektor perikanan memang memiliki volatilitas produksi yang tinggi akibat ketergantungan pada kondisi alam (Allison dkk, 2009).

Risiko pasar berupa fluktuasi harga ikan juga menjadi faktor signifikan yang memengaruhi kemampuan pembayaran kredit. Ketidakstabilan harga komoditas perikanan merupakan karakteristik

umum dalam sektor perikanan skala kecil (FAO, 2022).Menariknya, risiko gagal bayar berada pada kategori sedang meskipun dampaknya tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa nelayan memiliki komitmen pembayaran yang relatif baik, namun tetap rentan apabila terjadi shock eksternal seperti cuaca ekstrem atau penurunan harga drastis.

Implikasinya, skema pembiayaan berkelanjutan pada sektor *blue food* seharusnya menerapkan pendekatan risk-sharing mechanism, seperti asuransi perikanan, grace period berbasis musim, atau blended finance untuk menurunkan eksposur risiko lembaga keuangan (World Bank, 2021).

Hambatan Akses Pembiayaan

Analisis deskriptif menunjukkan bahwa hambatan utama dalam akses pembiayaan adalah keterbatasan agunan (72%), kompleksitas prosedur administrasi (65%), serta rendahnya literasi keuangan (58%).

Tabel 3. Hambatan Akses Pembiayaan

Hambatan	Persentase Responden (%)
Keterbatasan Agunan	72%
Prosedur Administrasi Rumit	65%
Literasi Keuangan Rendah	58%
Kurangnya Informasi Skema	46%

Tabel 3 menunjukkan bahwa keterbatasan agunan merupakan hambatan terbesar (72%). Kondisi ini umum terjadi pada UMKM sektor perikanan yang tidak memiliki aset tetap bernilai tinggi untuk dijadikan jaminan (Beck & Demirgüç-Kunt, 2006). Kompleksitas prosedur administrasi (65%) juga menjadi kendala signifikan. Hal ini mencerminkan adanya gap antara desain kebijakan pembiayaan dan kapasitas administratif pelaku usaha kecil di wilayah pesisir.

Rendahnya literasi keuangan (58%) memperkuat temuan bahwa peningkatan kapasitas SDM menjadi prasyarat penting dalam mendorong inklusi keuangan berkelanjutan (Lusardi & Mitchell, 2014). Tanpa pemahaman yang memadai mengenai manajemen keuangan dan risiko kredit, UMKM akan tetap berada pada lingkaran keterbatasan akses pembiayaan formal. Secara keseluruhan, hambatan-hambatan ini menunjukkan bahwa implementasi pembiayaan berkelanjutan pada sektor *blue food* tidak hanya memerlukan inovasi skema keuangan, tetapi juga penguatan kelembagaan kelompok dan peningkatan literasi keuangan berbasis komunitas.

SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pembiayaan yang diakses oleh anggota kelompok masih didominasi oleh skema konvensional, khususnya Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan koperasi nelayan. Meskipun akses terhadap pembiayaan formal telah tersedia, integrasi prinsip pembiayaan berkelanjutan yang mencakup aspek lingkungan dan sosial masih terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi *sustainable finance* pada sektor *blue food* belum sepenuhnya optimal. Dari sisi risiko, usaha perikanan memiliki karakteristik risiko produksi dan risiko pasar yang tinggi akibat ketergantungan pada kondisi cuaca dan fluktuasi harga komoditas. Profil risiko ini memengaruhi persepsi lembaga keuangan terhadap sektor perikanan sebagai sektor berisiko tinggi. Oleh karena itu, diperlukan skema pembiayaan adaptif yang mempertimbangkan pola musim tangkap serta mekanisme mitigasi risiko, seperti asuransi perikanan dan fleksibilitas pembayaran. Hambatan utama dalam akses pembiayaan meliputi keterbatasan agunan, kompleksitas prosedur administrasi, dan rendahnya literasi keuangan. Temuan ini menunjukkan bahwa tantangan pembiayaan UMKM perikanan bersifat multidimensional, mencakup aspek struktural, kelembagaan, dan kapasitas individu.

Secara keseluruhan, penguatan pembiayaan berkelanjutan pada sektor *blue food* memerlukan pendekatan terintegrasi melalui: (1) inovasi skema pembiayaan berbasis kelompok dan musim produksi, (2) integrasi mekanisme mitigasi risiko, (3) peningkatan literasi keuangan nelayan, serta (4) sinergi antara pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan kelembagaan kelompok usaha. Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan ketahanan ekonomi UMKM perikanan sekaligus mendorong pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adibrata, S., Pratiwi, A. N., Jesiska, A., Aulia, A., Animah, A., Purnamasari, A., Angelia, F., Rani, I. S., & Anggraini, N. (2022). Implementasi blue economy dengan pendampingan pembuatan buku profil UMKM produk olahan perikanan Desa Batu Belubang, Bangka Belitung. *Indonesia Berdaya*, 3(4), 1065–1072.
- Allison, E. H., Perry, A. L., Badjeck, M.-C., Adger, W. N., Brown, K., Conway, D., Halls, A. S., Pilling, G. M., Reynolds, J. D., Andrew, N. L., & Dulvy, N. K. (2009). Vulnerability of national economies to the impacts of climate change on fisheries. *Fish and Fisheries*, 10(2), 173–196. <https://doi.org/10.1111/j.1467-2979.2008.00310.x>
- Beck, T., & Demirgüç-Kunt, A. (2006). Small and medium-size enterprises: Access to finance as a growth constraint. *Journal of Banking & Finance*, 30(11), 2931–2943. <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2006.05.009>
- Bhattacharya, P., & Dash, A. K. (2020). Drivers of Blue Economy in Asia and Pacific Island Countries: An Empirical Investigation of Tourism and Fisheries Sectors. *ADB Working Paper*, 1161, 1–22.
- Cull, R., Ehrbeck, T., & Holle, N. (2014). Financial inclusion and development: Recent impact evidence. *Focus Note CGAP*, 92, 1–12. Consultative Group to Assist the Poor (CGAP).
- Demirgüç-Kunt, A., Klapper, L., Singer, D., Ansar, S., & Hess, J. (2018). *The Global Findex Database 2017: Measuring financial inclusion and the fintech revolution*. World Bank. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1259-0>
- Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2022). *The state of world fisheries and aquaculture 2022: Towards blue transformation*. FAO. <https://doi.org/10.4060/cc0461en>
- Helmi, A., & Arif, S. (2012). Strategi adaptasi nelayan terhadap perubahan ekologis. *Makara Seri Sosial-Humaniora*, 16(1), 68.
- Humairoh, T. L., Setyaningrum, I., & Tanaya, O. (2024). Keberlanjutan Blue Economy Melalui Kontribusi Industri Ikan Tangkap Dan Budidaya Ikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur. *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*, 7(2), 3443–3452.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, *Profil Kelautan Indonesia*, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Jakarta, 2022.
- Lusardi, A., & Mitchell, O. S. (2014). The economic importance of financial literacy: Theory and evidence. *Journal of Economic Literature*, 52(1), 5–44. <https://doi.org/10.1257/jel.52.1.5>
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2020). *Developing sustainable finance definitions and taxonomies*. OECD Publishing.
- Papur, M. G. D., Sitorus, G. A., Saribu, E. A. T., & Wuri, J. (2024). Konservasi Blue Economy untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta. *Prosiding Seminar Nasional Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 99–103.

Prayuda, R., Sary, D. V., & Riau, U. I. (2019). Strategi Indonesia Dalam Implementasi Konsep Blue Economy Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Di Era Masyarakat Ekonomi Asean a. *Indonesian Journal of International Relations*, 3(2), 46–64.

Rahman, A., Prakoso, L. Y., & Suwito, S. (2024). Strategi ekonomi pertahanan maritim dengan penerapan blue economy. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 11(4), 1480–1491.

Riesnandar, E., & Nuhartonosuro, I. M. (2025). Manajemen Sumber Daya Kelautan dalam Implementasi Blue Economy: Peluang dan Tantangan di Indonesia. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 8(4), 3645-3652. <https://doi.org/10.54371/jiip.v8i4.7567>

Tambunan, T. (2019). Recent evidence of the development of micro, small and medium enterprises in Indonesia. *Journal of Global Entrepreneurship Research*, 9(1), 18. <https://doi.org/10.1186/s40497-018-0140-4>

World Bank. (2021). *Mobilizing private finance for sustainable blue economy development*. World Bank Group.